

**IDENTIFIKASI PERAN *STAKEHOLDER* TERHADAP MASALAH
PERAMBAHAN DAN PERBURUAN LIAR DALAM KAWASAN CAGAR ALAM
WOLO TADHO (STUDI KASUS DESA TADHO DAN DESA LATUNG,
KECAMATAN RIUNG, KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR)**

**Filimona Meliyani Ndaomanu^{1*}, Maria M. E. Purnama², Fadlan Pramatana², Nixon
Rammang²**

¹ Mahasiswa Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana

² Dosen Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana

*Email: filimonandaomanu@gmail.com

Abstrak

Keywords:

*Cagar Alam Wolo
Tadho;
Perambahan;
Perburuan Liar*

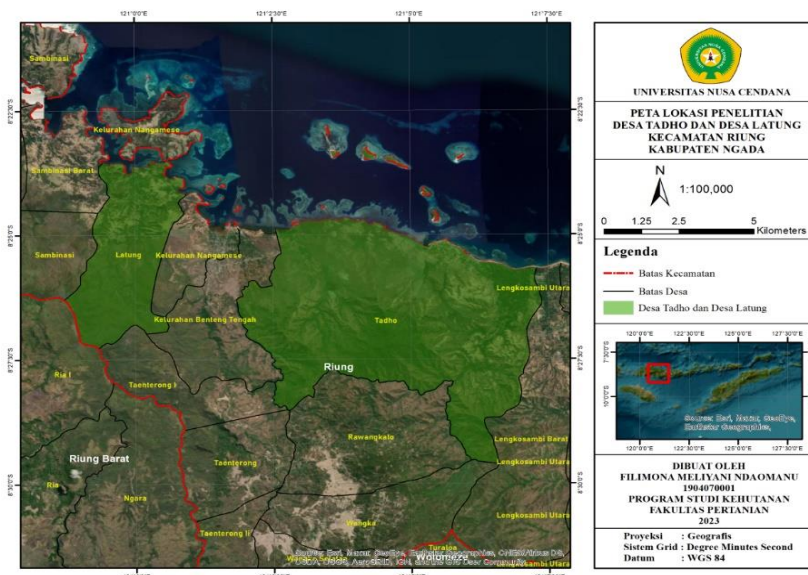
Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho berada dalam berbagai ancaman yakni kebakaran hutan, perambahan hutan, perburuan liar, illegal logging yang disebabkan oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Ancaman konservasi saat ini sangat terkait dengan kepengurusan dan pengelolaan. Konsekuensi dari pengelolaan tersebut adalah kurang terakomodasinya aspirasi masyarakat dan para pihak/pemangku kepentingan (stakeholder) untuk ikut bertanggungjawab (sharing of responsibility) dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi. Beberapa ancaman tersebut yaitu perambahan kawasan untuk lahan pertanian serta perburuan secara illegal yang dilakukan masyarakat disekitar kawasan maupun diluar kawasan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui stakeholder dan peranannya serta dampak dari perambahan dan perburuan dalam kawasan. Penentuan responden pada penelitian ini yaitu dengan purposive dan snowball sampling sebanyak 32 responden. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian disusun menjadi sebuah konsep pengembangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peran stakeholder yang teridentifikasi yaitu terdiri dari peran kunci (pihak pengelola dan pihak pemerintah) dengan analisis penilaian sudah berkoordinasi serta bekerjasama dengan stakeholder lainnya, peran primer (pihak pengelola dan masyarakat) dengan analisis penilaian belum terealisasikan, peran pendukung (masyarakat mitra polhut) dengan analisis penilaian sudah dilakukan namun belum optimal dikarenakan kurangnya pembiayaan.

1. PENDAHULUAN

Kawasan suaka alam merupakan salah satu bentuk kawasan lindung yang ditetapkan untuk tujuan perlindungan ekosistem dan pengembangan wisata. Karena kawasan suaka alam merupakan salah satu bentuk kawasan lindung, maka selain untuk perlindungan dan pengembangan, salah satu misi pokok pengelola kawasan konservasi adalah pengelolaan *biodiversity* (keanekaragaman hayati) dan ekosistemnya. Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho yang terletak di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur, kawasan ini ditetapkan melalui SK. No. 429 Tahun 1992 tentang Penetapan Kawasan Hutan Wolo Tadho dengan luasan 4.016,80 Ha. Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho saat ini berada dalam ancaman kerusakan yakni kebakaran hutan, perambahan hutan, perburuan liar, *illegal logging* yang disebabkan oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Setyowati (2008) ancaman konservasi saat ini sangat terkait dengan kepengurusan dan pengelolaan kawasan konservasi yang saat ini sering dinilai kurang partisipatif, transparan, bertanggungjawab dan bertanggung gugat. Konsekuensi dari pengelolaan tersebut adalah kurang terakomodasinya aspirasi masyarakat dan para pihak/pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk ikut berbagi tanggung jawab (*sharing of responsibility*) dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi. Maka dari itu harus adanya sinergi antar *stakeholder* dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi. Berbagai ancaman dan hambatan sering terjadi dalam mewujudkan kelestarian lingkungan dikawasan Cagar Alam Wolo Tadho. Beberapa ancaman tersebut yaitu perambahan kawasan untuk lahan pertanian serta perburuan secara illegal yang dilakukan masyarakat sekitar kawasan maupun diluar kawasan.

2. METODE

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juli bertempat di Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho yakni Desa Tadho dan Desa Latung, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Gambar 1 Peta Lokasi Penelitian

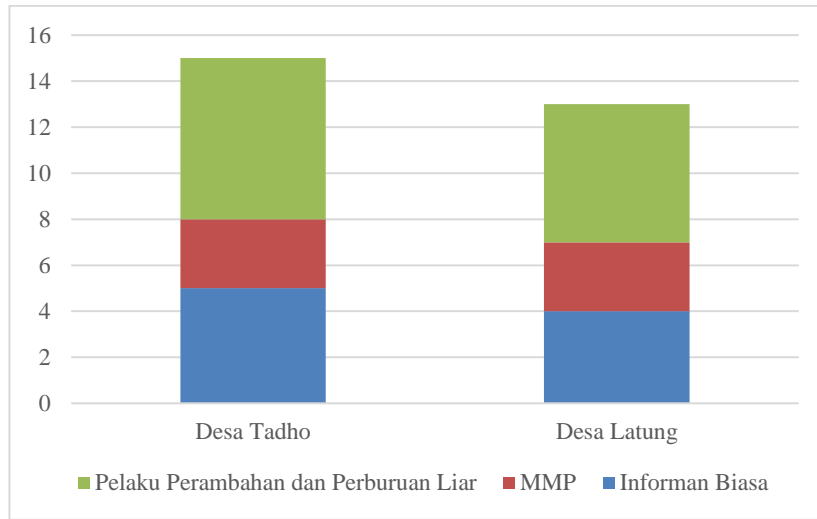
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan wawancara, alat tulis, kamera, GPS, Arcgis 10.8 dan laptop. Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang merupakan kumpulan pertanyaan yang diajukan kepada responden. Adapun Teknik Pengumpulan Data. Wawancara adalah sumber utama untuk memperoleh data dari narasumber atau informan yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan. Wawancara dalam penelitian kualitatif umumnya tidak terstruktur, tetapi dilakukan secara lebih mendalam. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan wawancara dengan model semi terstruktur, dimana telah disiapkan pedoman wawancara tetapi dapat berkembang lebih bebas, sesuai kondisi dan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap suatu objek. Selain itu peneliti juga melakukan pencatatan gejala-gejala yang terlihat di lapangan. Dokumentasi hasil penelitian dengan pengambilan foto-foto, video, rekaman suara, catatan lapangan serta sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi yang di ambil pada saat penelitian berlangsung atau setelah wawancara. Teknik pengumpulan sampel untuk kedua sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan *Non Probability Sampling*. *Non Probability Sampling* adalah teknik yang tidak memberikan peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2017). Teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman (Sugiono, 2011) terdiri dari mereduksi data, menyajikan data dan menyimpulkan data. Metode analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian disusun menjadi sebuah konsep pengembangan (Sugiono, 2011). Dalam penelitian ini dibatasi pada tiga fokus penelitian yaitu: 1) melakukan identifikasi para *stakeholders* yang terlibat dalam kasus perambahan dan perburuan liar, 2) menganalisis bentuk keterlibatan dari para *stakeholders*, dan 3) melihat dampak yang terjadi dari adanya kolaborasi dan sinergitas antar *stakeholders*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Karakteristik Informan

3.1.1. Karakteristik Kelompok Informan I

Kelompok informan I adalah masyarakat dari dua desa yang berbatasan atau yang berada dalam Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho. Penentuan informan ini menggunakan metode *snowball sampling* dengan parameter informan yang telah ditentukan sebelumnya. Metode *snowball sampling* ini diterapkan dari satu desa ke desa berikutnya dengan informan kunci berbeda pada setiap desa.



Gambar 2. Perbandingan Informan Biasa, MMP, dan Pelaku Perambahan dan Perburuan Liar di Setiap Desa

Perbandingan jumlah informan biasa dan pelaku perambahan dan perburuan liar disetiap desa adalah 15 orang informan di Desa Tadho terdapat 5 orang informan biasa, 3 orang masyarakat mitra polhut (MMP), dan 7 orang merupakan pelaku perambahan dan perburuan liar. Informan di Desa Latung 13 orang terdapat 4 informan biasa, 3 orang masyarakat mitra polhut (MMP) dan 6 orang merupakan pelaku perambahan dan perburuan liar.

3.1.2 Karakteristik Kelompok Informan II

Kelompok Informan II adalah petugas/pegawai yang bekerja di Kantor Resort KSDA Riung. Sesuai dengan kriteria untuk kelompok informan II, jumlah informan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan adalah sebanyak 2 orang dari total 5 pegawai yang bertugas diresort KSDA Riung.

Tabel 1. Perbandingan Informan Biasa, MMP, dan Pelaku Perambahan dan Perburuan Liar di Setiap Desa (Data Primer, 2023)

No	Usia (Tahun)	Tingkat Pendidikan	Lama Bertugas (Tahun)
1	49	Strata I	21
2	35	Strata I	10
			$\Sigma 15,5$

Pemilihan informan harus memperhatikan karakteristik dan tujuan penelitian. Pengetahuan informan akan menjadi objek penelitian serta menjadi karakteristik penentu pemilihan informan (Ulin *et al.*, 2005). Tabel 1 menunjukkan rata-rata lama bertugas kelompok informan II adalah 15,5 yang berarti telah memenuhi kriteria responden yang telah ditetapkan. Lama bertugas juga mempengaruhi tingkat pengetahuan petugas terhadap kondisi serta permasalahan yang dihadapi dilapangan.

3.1.3. Karakteristik Informan III

Kelompok informan III adalah pihak pemerintah (Kepala Desa).

Tabel 2. Usia, tingkat pendidikan Informan III

No	Usia (Tahun)	Pendidikan Terakhir
1	43	SMA
2	41	SMA

Pemilihan Kepala Desa sebagai informan III dikarenakan kedudukannya sebagai penguasa tunggal dalam pemerintah desa. Kepala desa adalah pelaksana dan penyelenggara urusan rumah tangga dan disamping itu kepala desa menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah (Surianingrat, 1992). Bersama-sama dengan perangkat desa lainnya beserta pihak pengelola Resort Riung dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan perambahan dan perburuan liar yang sering terjadi dikawasan Cagar Alam Wolo Tadho yang merupakan kawasan konservasi.

3.2. Identifikasi Stakeholder

Identifikasi *stakeholder* dalam penelitian ini mengacu pada Maryono (2005), dimana dalam hal analisis terhadap *stakeholders* yang selama ini terlibat dalam kasus perambahan dan perburuan liar dibedakan menurut tiga kelompok yaitu; *stakeholder* primer, *stakeholder* kunci, dan *stakeholder* pendukung. *Stakeholder* primer (utama) merupakan *stakeholder* yang terkena dampak langsung baik positif maupun negatif dari suatu rencana atau proyek serta mempunyai kaitan kepentingan langsung dengan kegiatan tersebut (Maryono et al., 2005). Dalam penelitian ini *stakeholder* kunci diidentifikasi berdasarkan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan *stakeholder* pendukung adalah *stakeholder* yang tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap kasus perambahan dan perburuan liar tetapi memiliki kepedulian yang besar untuk kelestarian alam (Maryono et al., 2005) dalam (Handayani, 2017). Dalam penelitian ini yang menjadi *Stakeholder* pendukung yaitu masyarakat mitra polhut (MMP). Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara terhadap informan bahwa kasus perambahan dan perburuan liar merupakan kasus yang sering terjadi di desa-desa penyangga dikarenakan kebutuhan ekonomi yang semakin bertambah akibat penambahan jumlah anggota keluarga. Pihak pengelola maupun pihak pemerintah sudah memberikan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar kawasan maupun diluar kawasan. *Stakeholder* kunci merupakan aktor kunci dalam penanganan kasus perambahan dan perburuan liar dalam kawasan. Sedangkan *stakeholder* pendukung adalah pihak yang tidak berkaitan langsung dalam penanganan kasus perambahan dan perburuan liar tetapi memiliki kepedulian terhadap kelestarian alam.

3.3. Identifikasi Peran *Stakeholder*

Berdasarkan identifikasi *stakeholder* yang selama ini terlibat dalam kasus perambahan dan perburuan liar dalam Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho selanjutnya dilakukan identifikasi peran *stakeholder* dengan metode realisasi peran *stakeholder* dalam kasus perambahan dan perburuan liar dalam Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho.

Tabel 3. Peranan *Stakeholder*

<i>Stakeholder</i>	Peran	Analisis penilaian
Kunci (Pihak Pengelola dan Pihak Pemerintah)	a) Melakukan pencegahan perambahan dan perburuan liar di kawasan hutan dengan cara memberikan sanksi berupa peraturan yang tertulis sesuai dengan undang-undang yang berlaku. b) Melakukan pemantauan terhadap kawasan hutan dalam hal, memeriksa keadaan kawasan dengan melakukan patroli rutin c) Peraturan desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	Peran aktor kunci sudah dilakukan dengan kerjasama dengan aktor pendukung lainnya.
Primer (Masyarakat dan Pihak Pengelola)	Memberikan pengetahuan dan upaya peningkatan konservasi hutan dan penerapannya diseluruh masyarakat hutan, seperti melakukan sosialisasi konservasi hutan kepada masyarakat	Belum terealisasikan
Pendukung (Masyarakat Mitra Polhut)	Menjaga kawasan dengan cara patroli untuk mencegah adanya perambahan dan perburuan liar serta memastikan masyarakat tidak melakukan perambahan dan perburuan liar serta memanfaatkan hasil hutan secara lestari	Kontribusi sudah dilakukan, namun belum optimal dikarenakan kurangnya pembiayaan dari pihak pengelola

Berdasarkan pada hasil analisis peran *stakeholder* pada Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa keterlibatan masing-masing *stakeholder* belum berjalan sesuai dengan fungsinya. Masih adanya kesenjangan antara *stakeholder* kunci dengan kedua *stakeholder* lainnya, sehingga implementasi dari peran masing-masing tidak terealisasi dengan baik dalam hal kasus perambahan dan perburuan liar. Pendekatan kolaborasi antara *stakeholder* mulai ada sebagai tuntutan kebutuhan akan kurangnya kelestarian alam dalam kawasan. Dalam hal ini, semua pihak yang terlibat memposisikan diri sesuai dengan perannya masing-masing agar mengurangi kasus perambahan dan perburuan liar. Pendapat lain yang mendukung hasil penelitian ini adalah partisipasi *stakeholder* perlu dilibatkan aktif dalam penanganan kasus perambahan dan perburuan liar (Hijriati dan Mardiana, 2015). Penanganan kasus perambahan dan perburuan liar tidak dapat terlaksanakan dengan baik apabila setiap *stakeholder* tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan perannya masing-masing. Peran aktif *stakeholder* merupakan kunci utama yang sangat penting dalam penanganan kasus perambahan dan perburuan liar karena kasus perambahan dan perburuan liar bukan saja menjadi tanggungjawab satu pihak, namun dibutuhkan keterlibatan aktif secara kolaboratif bersama *stakeholder* lainnya (Oktami, 2018).

3.4. Dampak Perambahan dan Perburuan Liar

Dampak dari aktivitas perambahan dalam kawasan konservasi terjadi dikarenakan adanya peningkatan jumlah penduduk disekitar kawasan maupun dalam kawasan. Dampak lain dari aktivitas perambahan yakni terjadinya kekeringan berkepanjangan yang mengakibatkan masyarakat susah memperoleh air dan diperlukan penggalian sumur untuk memperoleh sumber air yang lebih. Iklim yang tidak menentu menyebabkan masyarakat susah untuk memprediksi musim tanam (Kaimuddin, 2008). Dampak dari aktivitas perburuan liar dalam kawasan konservasi adalah terganggunya ekosistem dikarenakan beberapa satwa yang berperan penting bagi ekosistem hutan berkurang bahkan ada beberapa yang sudah punah. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, kegiatan berburu bisa dilakukan oleh siapapun baik orang dewasa, remaja, maupun lansia. Keterampilan berburu didapatkan dari pengalaman dan praktik, serta pengetahuan secara turun temurun (Masyithah *et al.*, 2016).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada tujuan penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat dibuat kesimpulan yaitu *stakeholder* dalam kasus perambahan dan perburuan liar yang terjadi didalam Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho yakni pihak pengelola, masyarakat, masyarakat mitra polhut, serta pihak pemerintah (Kepala Desa). Serta belum optimalnya peran *stakeholder* dalam penanganan permasalahan kehutanan yang terjadi di Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho. Perambahan kawasan konservasi yang terjadi dikawasan konservasi Cagar Alam Wolo Tadho disebabkan oleh perekonomian masyarakat dikarenakan bertambahnya jumlah anggota keluarga sedangkan perburuan liar yang terjadi

dikawasan konservasi Cagar Alam Wolo Tadho dikonsumsi secara pribadi maupun mengikuti adat istiadat setempat yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan Juli-Agustus.

REFERENSI

- Bayu Surianingrat, 1992, Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan, Cet IV, Rineka Cipta, Jakarta.
- Fitri Handayani, H. W. (2017). Analisis Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang. Fakultas Ilmu Sosial, 1–13.
- Hijriati, E., & Mardiana, R. (2015). Pengaruh Ekowisata Berbasis Masyarakat Terhadap Perubahan Kondisi Ekologi, Sosial Dan Ekonomi Di Kampung Batusuhunan, Sukabumi. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2(3), 146–159
- Kaimuddin. 2008. Analisis Perambahan Kawasan Hutan Terhadap Kebocoran Carbondan Perubahan Iklim (Studi Kasus Desa Bantimurung Kecamatan Bone Bone Luwu Utara)
- Masyithah., Hariyadi, B., Kartika, W.D. 2016. Kajian etnozooologi hewan yang dikonsumsi pada komunitas Orang Rimba di Taman Nasional Bukit Duabelas Kabupaten Sarolangun. *Bio-site*. 2(2): 10 – 18
- Oktami A.E, Tutut S, dan Harios. A., 2018. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Ekowisata Taman Hutan Raya Ir H Djuanda. *Jurnal Media Konservasi* Vol. 23 No. 3 Desember 2018: 236-243
- Setyowati, Abidah., *Et Al.* 2008. *Konservasi Indonesia, Sebuah Potret Pengelolaan & Kebijakan*. Bogor: Pokja Kebijakan Konservasi, Usaid Dan Esp
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV
- Ulin, P. R., Robinson, E. T., & Tolley, E. L. 2005. *Qualitative Methods in Public Health: A Field Guide for Applied Research*. San Fransisco: Jossey-Bass.